

# ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (Studi Kasus Di Puskesmas Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)

Alfi Sani<sup>1</sup>

[alfisani33@gmail.com](mailto:alfisani33@gmail.com)

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Nur Fitriyah<sup>2</sup>

[nurfitriyah@unram.ac.id](mailto:nurfitriyah@unram.ac.id)

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

## ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dana BOK di Puskesmas Wanasaba. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yakni kepala puskesmas, bendahara BOK, dan staf teknis BOK. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dana BOK dilihat dari indikator pemanfaatan dana di tingkat puskesmas, pertanggungjawaban dana, dan pencatatan/pembukuan dapat dikatakan sudah akuntabel, meskipun terdapat kendala dalam proses pengiriman pelaporannya. Kemudian mengenai transparansi pengelolaan dana BOK dilihat dari indikator *informativeness* (informatif), dan *openness* (Keterbukaan), bahwa pemberian informasi dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana BOK dapat dikatakan sudah baik atau transparan, meskipun keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana BOK ke masyarakat atau stakeholder hanya melalui kegiatan lintas sektor. Selanjutnya efektivitas dalam pengelolaan dana BOK dilihat dari keberhasilan sasaran, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program, dan pencapaian tujuan menyeluruh dapat dikatakan sudah efektif.

**Kata Kunci:** akuntabilitas, dana BOK, transparansi, pengelolaan, efektivitas, penggunaan.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the accountability, transparency, and effectiveness of BOK funds at the Wanasaba Community Health Center. The research method employed was qualitative descriptive, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. There were three informants in this study: the health center director, the BOK treasurer, and a BOK technical staff member. The findings indicate that the accountability of BOK funds—as measured by indicators of fund utilization at the health center level, financial accountability, and record-keeping—can be considered accountable, although there are challenges in the reporting process. Regarding the transparency of BOK fund management, as assessed by the indicators of informativeness and openness, the provision of information and the openness of information regarding BOK fund management can be considered good or transparent, although the disclosure of information about BOK fund management to the public or stakeholders is limited to cross-sectoral activities. Furthermore, the effectiveness of BOK fund management, as assessed by the achievement of targets, the amount of budget allocated to programs, and the attainment of overall objectives, can be considered effective.*

**Keywords:** *accountability, BOK funds, transparency, management, effectiveness, use.*

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan investasi yang membantu keberhasilan pembangunan suatu bangsa serta memiliki peran mengurangi kemiskinan. (Pasal 34 ayat (3) UUD 1945) menyebutkan pemerintah harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang layak. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melaksanakan program di Indonesia Salsabila, (2023). Dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan di daerah, salah satunya diwujudkan dengan pelayanan unit terkecil yakni Puskesmas. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan akses pelayanan di puskesmas yaitu dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Suparmi, *et al.*, (2020) yang dikutip dari (Megawati et al., 2023).

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Bantuan Operasional Kesehatan ini merupakan sumber dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan. Melalui keberadaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diharapkan dapat mendorong dan mempercepat perkembangan sektor kesehatan di Indonesia. (Mardiansih, 2021).

Pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan, harus diperhatikan petunjuk teknis dan peraturan terkait lainnya. Dana BOK yang diberikan kepada puskesmas harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (PMK RI No 42 tahun 2022). oleh sebab itu puskesmas harus mampu untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota ataupun pemerintah. Regulasi pengelolaan dan penggunaan dana BOK tahun 2023 yang dikeluarkan pemerintah kesehatan diatur dalam PMK no 42 tahun 2022 sebagai rambu-rambu pengelolaan dana BOK.

Pelaksanaan kegiatan perogram BOK terkadang tidak semulus yang direncanakan, berbagai hambatan bermunculan dan tentu saja hal ini berimbas pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam mendukung kegiatan Puskesmas. penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2023) mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh stakeholder dalam menyusun pertanggungjawaban pengelolaan dana BOK di puskesmas yaitu kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan komputer, tidak adanya alat dokumentasi yang disiapkan oleh Puskesmas, banyaknya tugas pokok didalam maupun diluar gedung, banyaknya laporan yang disusun setiap bulan, dan adanya tugas ganda yang dilakukan kepada pengelola BOK Puskesmas.

Penelitian Yang dilakukan oleh Kurnia & Hendrikus Triwibawanto Gedeona, (2016) tentang Implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Kota Bandung tersebut pada tahun 2014, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidak fleksibelan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan promosi oleh pihak pengelola puskesmas. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang ada juga belum mencukupi dan masih kurang memadai. Terdapat beberapa sumber dana yang diterima oleh puskesmas, antara lain APBD, APBN, dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk dana kapitas, yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi tanggung jawab administrasi keuangan. Hal ini berimbas pada pencapaian tujuan utama dari pemberian dana BOK, yaitu untuk mencapai target SPM dan MDGs di sektor kesehatan pada tahun 2015 yang belum maksimal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda & Hardiana, (2019) tentang Alternatif Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan

Anak Cakupan K1-K4 dikatakan bahwa, ada 4 permasalahan dalam pengelolaan dana BOK salah satunya yaitu keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan dan terlambatnya pencairan dana BOK, hal ini disebabkan karena laporan kegiatan puskesmas yang terlambat. Untuk mencegah hal yang tersebut, maka diperlukan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan yang baik.

Mengacu pada beberapa permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan keadaan di mana para pengurus tidak terdorong oleh tujuan pribadi melainkan lebih fokus pada pencapaian hasil utama demi kebaikan organisasi (Anton, 2020) yang dikutip dari (Aeni et al., 2022). Untuk memahami perilaku manajer dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Wanasaba. Para pengelola dana BOK diharapkan dapat berperan sebagai steward yang melaksanakan amanah dari pemerintah dalam mengelola dana kesehatan dengan cara yang akuntabel, transparan, dan efektif, demi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya rasa tanggung jawab dan dedikasi terhadap organisasi, pengelolaan dana BOK dapat berjalan selaras dengan tujuan program kesehatan yang telah disusun.

### Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas publik menurut Kusumastuti (2014:2) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya

Manfaat dari adanya akuntabilitas adalah menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif (Nur Fitriyah et al., 2021). Indikator-indikator kinerja BOK agar bisa mewujudkan akuntabilitas untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK di tingkat puskesmas menurut PMK RI NO.11 Tahun 2015 Bab III halaman 43 yang dikutip dari Ratdo, (2019) Pertanggungjawaban dan pemanfaatan BOK Tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Dana Di tingkat Puskesmas
2. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOK di Puskesmas
3. Pencatatan/Pembukuan

### Transparansi

Krina (2013:133) yang dikutip dari buku Edowai et al., (2021) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Manfaat dengan adanya transparansi adalah dimana segala kebijakan yang diambil atau kegiatan yang terjadi dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindakan penyimpangan ataupun kecurangan di dalamnya.

Indikator transparansi menurut Mardiasmo, (2018 :19) adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Openness (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

### **Efektivitas**

Menurut (Permendagri No 13 Tahun 2006), efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas program dapat diwujudkan dengan kecakapan operasional dalam pelaksanaan program kerja sesuai dengan tujuan yang diberikan, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lembaga atau organisasi dalam melaksanakan segala tugas pokoknya atau mencapai tujuan yang diberikan. Pendekatan efektivitas diterapkan dengan mengacu pada berbagai bagian lembaga dimana lembaga menerima informasi dari berbagai sumber di lingkungannya. Tujuan Efektivitas dalam ilmu administrasi publik adalah untuk mengukur sebuah proses yang telah dilaksanakan atau diimplementasikan tepat sasaran atau mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya

Indikator efektivitas menurut Mahmudi, (2015:105) adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan sasaran
2. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program
3. Pencapaian tujuan menyeluruh

### **Bantuan Operasional Kesehatan**

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian kesehatan dalam membantu Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Kesehatan tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (Permenkes NO 42 tahun 2022). Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya (Permenkes NO 42 tahun 2022).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana BOK ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan lokasi yang berbeda-beda yang dilakukan oleh: (Ningsih, 2017),(Risda, 2023), (Salsabila, 2023) secara garis besar ketiga penelitian ini menyatakan hasil penelitian yang sama bahwa akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana BOK sudah berjalan dengan baik. Kecuali penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2023) ditemukan fakta hasil penelitian bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh stakeholder dalam menyusun pertanggungjawabannya yaitu kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan komputer, tidak adanya alat dokumentasi yang disiapkan oleh Puskesmas, banyaknya tugas pokok didalam maupun diluar gedung, banyaknya laporan yang disusun setiap bulan, dan adanya tugas ganda yang dilakukan kepada pengelola BOK Puskesmas.

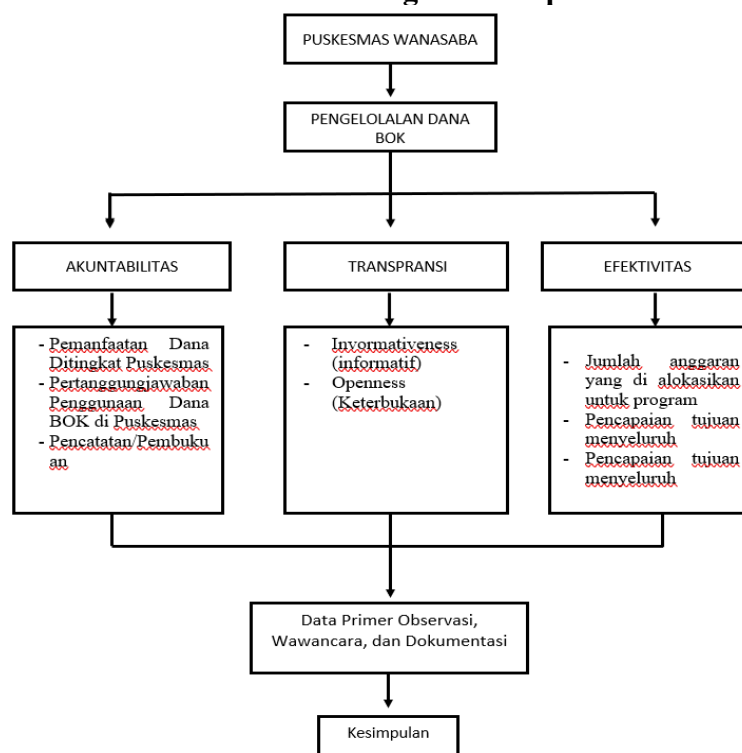
### **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengelolaan dana BOK berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana BOK yang mengacu pada JUKNIS BOK 2023 dengan adanya regulasi tersebut menjadi rambu-rambu terkait pengelolaan yang sesuai dan sah. Pengelolaan dana BOK berdasarkan pada JUKNIS secara garis besar terdiri dari

tahap perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban dengan melibatkan peranan tim pengelola dana BOK di Puskesmas Wanasaba. Akuntabilitas menggambarkan kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOK melalui laporan kegiatan dan laporan keuangan. Transparansi menunjukkan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana kepada pihak terkait. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan keberhasilan penggunaan dana dalam mencapai target program kesehatan di puskesmas.

Apabila akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas terlaksana dengan baik, maka pengelolaan dana BOK akan berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, Teori Stewardship menekankan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh sikap tanggung jawab dan komitmen pengelola dalam menjalankan amanah organisasi.

**Gambar 1 Kerangka Konseptual**



*Sumber: Data diolah peneliti*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan menggunakan data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui tenaga ahli yang terlibat dalam pengelolaan dana BOK yaitu tim pengelola BOK Puskesmas Wanasaba. Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Wanasaba. Penelitian ini menggunakan serangkaian proses dan teknik untuk menguji keabsahan data dengan uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data sehingga peneliti peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi, dan uji konfirmability dengan cara melakukan audit terhadap dokumen yang ada. Analisis terhadap data yang peneliti peroleh dengan cara tiga tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

UPT Puskesmas Wanasaba merupakan salah satu dari 2 Puskesmas di Kecamatan Wanasaba dan UPT Puskesmas Wanasaba berada di wilayah Desa Wanasaba Lauk. UPT Puskesmas Wanasaba awalnya merupakan satu-satunya puskesmas di kecamatan wanasaba dibangun sesuai standar puskesmas rawat inap satu lantai pada sejak tahun 1990 yang kemudian mengalami renovasi menjadi dua lantai dan ditambahkan rawat inap pada tahun 2019.

Puskesmas Wanasaba sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 mempunyai fungsi sebagai:

1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerja.
2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerja.

UPT Puskesmas Wanasaba Kabupaten Lombok Timur berlokasi di Jl. Raya Labuhan Lombok No.17, Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan wilayah kerja sebanyak 8 desa di wilayah kecamatan Wanasaba. UPT Puskesmas Wanasaba didukung jejaring dibawahnya sebanyak 3 Pustu, 6 Poskesdes, dan 64 posyandu Balita serta 64 Posyandu Lansia.

### Hasil Analisis Data

Dana Bantuan Operasional Kesehatan digunakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan MDGs, serta mendukung terselenggaranya proses lokakarya mini di puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

**Table 1 Rincian Anggaran Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wanasaba Tahun 2023**

Bulan	Sasaran	Realisasi	Sisa	Persentase
Januari	47,480,000	47,480,000	-	100%
Februari	77,027,185	76,956,992	70,194	99%
Maret	69,145,735	68,887,739	257,996	99%
April	58,096,729	57,963,712	133,016	99%
Mei	83,410,060	83,410,060	-	100%
Juni	86,367,151	85,967,151	400,000	99%
Juli	68,346,073	67,996,073	350,000	99%
Agustus	78,783,658	78,633,658	150,000	99%
September	82,625,290	82,625,290	-	100%
Oktober	63,484,383	63,471,455	12,928	99%
November	47,147,156	47,147,156	-	100%
Desember	71,362,971	69,862,971	1,500,000	97%
<b>Total</b>	<b>833,276,391</b>	<b>830,402,257</b>	<b>2,874,134</b>	<b>99%</b>

*Sumber: Data Realisasi Dana BOK Puskesmas wanasaba tahun 2023*

Berdasarkan hasil tabel 1 terkait rincian anggaran belanja dana BOK di Puskesmas Wanasaba tahun anggaran 2023 didapatkan hasil bahwa pemanfaatan anggaran Bantuan

operasional kesehatan di Puskesmas Wanasaba sudah terealisasi 99% dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan juknis BOK 2023.

## Hasil Penelitian

### Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Wanasaba

Akuntabilitas berperan sebagai tanggung jawab Puskesmas terhadap sejumlah anggaran dari program Bantuan Operasional Kesehatan yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, yang kemudian disalurkan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas dengan besaran dana yang bervariasi di setiap puskesmas. Hal ini disebabkan oleh perlunya kesesuaian dengan kriteria di masing-masing daerah, seperti: luas area, jumlah penduduk, dan adanya wilayah yang sulit dijangkau.

Untuk mengukur akuntabilitas dana bantuan operasional kesehatan di Puskesmas wanasaba peneliti mengukurnya menggunakan indikator PMK RI NO.11 Tahun 2015 Bab III halaman 43 yang dikutip dari Ratdo, (2019) Pertanggungjawaban dan pemanfaatan BOK Tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut:

### Pemanfaatan dana di tingkat Puskesmas

Dana merupakan sekumpulan uang atau sumber daya keuangan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk tujuan tertentu, terutama dalam konteks pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Khususnya dalam sektor kesehatan, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah alokasi dana yang tidak bersifat fisik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu mendukung pembiayaan kegiatan operasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah, sesuai dengan program prioritas nasional di bidang kesehatan.

**Table 2 Ringkasan Hasil Wawancara pemanfaatan dana di tingkat puskesmas**

NO	Item Pemanfaatan dana di tingkat puskesmas	Pemanfaatan dana di tingkat puskesmas
1	Perencanaan penggunaan dana anggaran BOK di Puskesmas Wanasaba	Proses penyusunan perencanaan anggaran dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan dilakukan 1 tahun sekali setelah menerima arahan dari dinas kesehatan, dalam perencanaannya tidak melibat sektor lain di luar kesehatan.
2	Pengelolaan penggunaan dana anggaran BOK di Puskesmas Wanasaba	Dana BOK di Puskesmas Wanasaba digunakan berdasarkan Juknis BOK untuk kegiatan – kegiatan UKM yang bersifat preventif sedangkan untuk pembiayaannya digunakan untuk membiayai transportasi, konsumsi rapat/pertemuan, foto copy, poster/banner dan pemberian makanan tambahan.

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui bahwa dalam pemanfaatan dana di Puskesmas Wanasaba sudah sesuai dengan Juknis BOK 2023 yang telah ditetapkan kementerian kesehatan. Dimana RAB (Rencana Anggaran Belanja) di Puskesmas Wanasaba dibuat 1 tahun sekali setelah menerima arahan dari dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam perencanaannya sendiri hanya melibatkan sektor kesehatan yang di antara Kepala Puskesmas, Bendahara BOK, dan penanggung jawab setiap program. Untuk pemanfaatan penggunaan dana digunakan sesuai dengan JUKNIS BOK tahun 2023 untuk kegiatan operasional promotif dan preventif UKM Puskesmas dan jaringannya.

### Laporan pertanggungjawaban

Pelaporan dana BOK adalah proses penyusunan dan penyampaian laporan mengenai, penerimaan, penggunaan, sisa dana, dan hasil kegiatan yang dibiayai oleh dana BOK di Puskesmas. Pada juknis BOK 2023 dijelaskan Pelaporan menjadi bagian penting karena ditujukan untuk mengawasi penggunaan dana, menilai capaian program puskesmas, dan dasar penyaluran dana untuk tahap berikutnya.

**Tabel 3 Ringkasan Hasil Wawancara pertanggungjawaban penggunaan dana**

NO	Item Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1	Alur Pelaporan dana BOK di Puskesmas Wanasaba	Pelaporan dana BOK di puskesmas wanasaba dilakukan setelah selesai kegiatan, penanggung jawab program membuat laporan dana BOK dan meminta tanda tangan kepala puskesmas sebagai penanggung jawab kegiatan. Dalam pelaporannya terkadang mengalami kendala, kendala ini disebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan dan penyesuaian dalam peraturan terbaru.

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui bahwa, pelaporan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan dalam 3 tahap melalui aplikasi E-renggar, pelaporan tersebut berupa SPPD, SPT, daftar transport, kwitansi, dokumen, sama laporan kegiatan. Pelaporan dana BOK di Puskesmas wanasaba terkadang mengalami beberapa kendala yang disebabkan karena keterlambatan pengiriman pelaporan dana BOK, keterlambatan disebabkan staf pengelola dana BOK harus menyesuaikan diri dengan aturan atau juknis yang baru. Salah satu aturan tersebut adalah adanya SPPD yang membutuhkan tanda tangan Kepala Desa atau pejabat setempat.

### Pencatatan/pembukuan

Pencatatan dana BOK mencakup pencatatan transaksinya dengan detail oleh bendahara BOK, serta penyusunan dan pengesahan laporan realisasi mengenai pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, terdapat juga proses verifikasi dan rekonsiliasi laporan, beserta pengelolaan rekening yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam JUKNIS BOK. Tujuan dari seluruh proses ini adalah untuk memastikan bahwa dana BOK digunakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang ada.

**Table 4 Ringkasan Hasil Wawancara Pencatatan/pembukuan**

NO	Item Pencatatan/Pembukuan	Pencatatan/pembukuan
1	Tempat Pencatatan pemasukan atau pengeluaran dana BOK	Pencatatan atau pembukuan di Puskesmas Wanasaba selalu dilakukan secara rutin oleh bendahara BOK yaitu dilakukan setiap ada dana yang masuk dan keluar. Pencatatan dilakukan di Buku Kas Umum (BKU), BKU ini dilaporkan kepada kepala puskesmas setelah itu dilaporkan ke dinas kabupaten kabupaten.

*Sumber: Data di olah oleh peneliti*

Dapat diketahui bahwa, terkait proses pencatatan/pembukuan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan secara rutin oleh bendahara BOK, yang dimana bendahara BOK selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran dana BOK secara rutin di Buku Kas Tunai (BKU) Buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan buku bank, setelah selesai melakukan pencatatan bendahara BOK melaporkannya kepada kepala puskesmas setelah disetujui bendahara BOK melaporkan kembali ke dinas kesehatan kabupaten.

### **Transparansi Pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Wanasaba**

Transparansi adalah salah satu asas utama dalam manajemen keuangan publik, termasuk dalam administrasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Transparansi mengacu pada sikap terbuka dalam menyampaikan informasi kepada semua pemangku kepentingan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan akuntabilitas dana yang dikelola. Dalam konteks Puskesmas, transparansi mengenai Dana BOK sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak yang berhubungan.

Untuk mengukur transparansi dana bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Wanasaba peneliti mengukurnya menggunakan indikator Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) yang dikutip dari buku Edowai Mikael at all (2021) adalah sebagai berikut:

#### **Informativeness (informatif)**

Dalam pelaksanaan sehari-hari, pengelolaan dana BOK yang transparan dapat diamati dari adanya pertemuan koordinasi di dalam puskesmas, penyelenggaraan lokakarya bulanan kecil, penyampaian laporan mengenai penggunaan anggaran, serta pemasangan informasi di papan atau media publikasi terkait program yang didanai oleh BOK. Dengan adanya informasi yang disampaikan ini, setiap petugas dapat mengenali tugas dan tanggung jawab mereka, sementara masyarakat bisa memahami jenis layanan yang disediakan oleh puskesmas.

**Table 5 Ringkasan Hasil Wawancara Informativeness (informatif)**

NO	Item Informativeness (informatif)	Informativeness (informatif)
1	Pemberian informasi kepada staf, masyarakat atau <i>stakeholder</i> yang membutuhkan tentang Pengelolaan dana BOK di Puskesmas Wanasaba	Dalam pemberian informasi kepada staf tentang dana program BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan sosialisasi, sosialisasi dilakukan berjenjang dari tingkat Provinsi, kabupaten setelah itu ke Puskesmas. Informasi diberikan kepada staf melalui grup wa atau lokmin, sedangkan untuk pemberian informasi pada masyarakat dilakukan pada saat melakukan kegiatan lintas sektor dan kegiatan di masyarakat.

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui bahwa dalam memberikan informasi kepada staf, masyarakat atau *stakeholder* yang membutuhkan nya, pihak puskesmas memberikan informasi kepada staf melalui sosialisasi atau lokmin Puskesmas, sedangkan untuk pemberian informasi kepada masyarakat atau *stakeholder* yang membutuhkan dilakukan pada saat melakukan kegiatan lintas sektor atau kegiatan di wilayah kerja puskesmas.

#### **Openness (Keterbukaan)**

Dana BOK adalah dana yang berasal dari pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan kegiatan promotif dan pencegahan di puskesmas. Karena dana ini diambil dari anggaran negara, pengelolaannya perlu dilakukan dengan transparan untuk mencegah munculnya kecurigaan, penyalahgunaan, dan ketidakefisienan dalam penggunaan dana tersebut. Keterbukaan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kepercayaan antara puskesmas, pemerintah daerah, tenaga medis, serta masyarakat yang menerima manfaat dari program ini.

**Table 6 Ringkasan Hasil Wawancara Openness (Keterbukaan)**

NO	Item Openness (Keterbukaan)	Openness (Keterbukaan)
1	Keterbukaan pada proses pengelolaan dana BOK di Puskesmas Wanasaba	Pengelolaan dana BOK di Puskesmas wanasaba sudah terbuka, ini dilihat dari mulai proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOK melibatkan seluruh staf pengelola BOK, namun untuk penyampaian terkait penyelenggaraan program BOK disampaikan ke masyarakat hanya melalui kegiatan lintas sektor

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan secara terbuka, dimulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan melibatkan seluruh staf pengelola di puskesmas. Namun untuk menyampaikan informasi terkait program atau penggunaan dana BOK ke masyarakat hanya melalui forum lintas sektor.

### **Efektivitas Pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Wanasaba**

Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas mencerminkan sejauh mana pengelolaan dana bisa mencapai sasaran program yang telah ditentukan. Efektivitas mencerminkan seberapa baik dana BOK diarahkan dengan tepat, digunakan tepat waktu, serta berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Ketika tingkat pencapaian tujuan program semakin tinggi, maka pengelolaan dana BOK oleh puskesmas menjadi semakin efektif.

Untuk mengukur efektivitas dana BOK di Puskesmas wanasaba peneliti menggunakan indikator Menurut Mahmudi, (2015:105) berikut ini.

### **Keberhasilan sasaran**

Keberhasilan tujuan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas menunjukkan sejauh mana program dan target yang telah ditentukan dapat tercapai melalui pemanfaatan dana BOK dengan tepat. Dana BOK disalurkan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, terutama dalam kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh puskesmas. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan dapat dipahami sebagai kemampuan puskesmas dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut, sehingga program kesehatan dapat menjangkau populasi yang memerlukan dan menghasilkan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Tabel Ringkasan 7 Hasil Wawancara Keberhasilan Sasaran**

NO	Item keberhasilan sasaran	Keberhasilan sasaran
1	Pengaruh program BOK terhadap Masyarakat di wilayah kerja puskesmas	Pelayanan-pelayanan seperti ukm esensial maupun pengembangan yang diberikan ke masyarakat sangat berpengaruh positif diwilayah kerja puskesmas.

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui pengaruh program dana BOK sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesehatan masyarakat. Pelayanan yang diberikan ke masyarakat yang didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas berfokus pada upaya promotif dan preventif, yaitu upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit di masyarakat.

### **Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program**

Jumlah dana yang disediakan untuk program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas merupakan nilai yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan

program kesehatan dasar, terutama dalam kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Alokasi dana ini menjadi elemen krusial dalam mendukung keberhasilan program kesehatan di puskesmas, karena dengan dana tersebut, beragam aktivitas operasional dapat dijalankan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan daerah kerja.

**Tabel 8 Ringkasan Hasil Wawancara Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Program**

NO	Item Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Program	Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Program
1	Pembagian penggunaan dana anggaran untuk setiap program BOK di puskesmas	Pembagian penggunaan anggaran untuk setiap program dilakukan setelah pencairan dana, dana kemudian dialokasikan untuk setiap program. Dana anggaran yang dialokasikan untuk setiap program BOK di puskesmas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program yang dibahas pada saat melakukan perencanaan.

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui bahwa dalam pencairan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan secara bertahap dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan, pengajuan ke dinkes, mendapat persetujuan dari dinkes dan pencairan dana masuk kerekening Puskesmas Wanasaba. Setelah melakukan pencairan dana, anggaran yang didapatkan kemudian dialokasikan untuk setiap program, anggaran setiap program ditentukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

### Capaian tujuan menyeluruh

Capaian keseluruhan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai seberapa efektif suatu program dalam pemerintahan termasuk puskesmas. Capaian keseluruhan dapat dimaknai sebagai level keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditentukan, baik dari sisi output, outcome, maupun pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam ranah pengelolaan dana BOK, capaian keseluruhan tidak hanya dievaluasi dari seberapa besar anggaran yang dimanfaatkan, namun juga dilihat dari keberhasilan aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

**Table 9. Ringkasan Hasil Wawancara Capaian Tujuan Menyeluruh**

NO	Item capaian Tujuan Menyeluruh	Capaian Tujuan Menyeluruh
1	Capaian target kinerja pelayanan program BOK di puskesmas	Capaian target pengelolaan dana BOK di puskesmas wanasaba dilihat dari realisasi penggunaan dana BOK, dilakukan evaluasi apabila kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Dapat diketahui pencapaian tujuan menyeluruh di puskesmas wanasaba dilihat dari pencapaian target pelaksanaan seluruh program yang sudah direncanakan. Pencapaian target pelaksanaan program BOK di puskesmas wanasaba dilihat dari realisasi penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai setiap program yang sudah direncanakan. Pencapaian target pelaksanaan program dana BOK di puskesmas wanasaba tidak hanya dilihat dari realisasi penggunaan dana, tetapi juga melihat kondisi kesehatan masyarakat yang sesungguhnya yang berada di wilayah puskesmas. Dilakukan evaluasi apabila program yang direncanakan tidak sesuai target pencapaian, evaluasi internal dilaksanakan oleh kepala puskesmas dan bendahara BOK pada saat melakukan lokmin setiap bulan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program, menemukan kekurangan, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan.

## **Pembahasan**

Teori Stewardship mengungkapkan bahwa pengelola suatu organisasi pada dasarnya mempunyai karakter yang bisa diandalkan, punya rasa tanggung jawab, dan lebih memprioritaskan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Dalam konteks pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wanasaba, teori ini sangat sesuai untuk mengamati bagaimana pengelola dana BOK menjalankan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah demi mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, yang menyatakan bahwa seorang steward akan bertindak selaras dengan tujuan organisasi karena pencapaian organisasi juga berkaitan dengan kesuksesan pribadinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan Teori Stewardship dapat dilihat dari tanggung jawab pihak yang mengelola dana BOK dalam menjalankan program-program kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan oleh pemerintah. Kepala puskesmas, bendahara BOK, dan penanggung jawab program menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan layanan kesehatan, termasuk kegiatan promotif dan preventif untuk masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelola berperan sebagai steward yang berusaha mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Terkait dengan akuntabilitas transparansi dan efektivitas dana BOK di puskesmas wanasaba yang menjadi sampel penelitian didapatkan hasil:

### **1. Pemanfaatan dana di tingkat Puskesmas**

Pemanfaatan dana BOK di tingkat Puskesmas sudah baik dan sudah sesuai dan JUKNIS BOK 2023. Ini dilihat dari proses perencanaan dan pengelolaan dana BOK di puskesmas wanasaba. Didapatkan hasil bahwa dalam proses penyusunan perencanaan dana BOK di puskesmas wanasaba yang dilakukan oleh Puskesmas wanasaba dapat dikatakan baik dan beruntun, ini dilihat dari proses perencanaan yang dilakukan di Puskesmas Wanasaba dimulai dari pertemuan yang diadakan untuk membahas Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dilanjutkan dengan membahas RKAP dan melakukan konsultasi pada Dinas Kesehatan terkait menu kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk pengelolaannya dana BOK di puskesmas wanasaba sudah baik ini dilihat dari pelaksanaan dan penggunaannya dilandaskan sudah sesuai dengan juknis BOK tahun anggaran 2023

### **2. Laporan pertanggungjawaban**

Alur pelaporan yang dilakukan oleh Puskesmas Wanasaba dapat dikatakan baik, meskipun dalam pelaporannya mengalami kendala dalam pembuatan spj. Pelaporan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dimulai setelah menyelesaikan kegiatan, setelah itu penanggung jawab program membuat laporan pertanggung jawaban dan meminta tanda tangan kepala puskesmas sebagai penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya, laporan tersebut diserahkan kepada Bendahara BOK untuk selanjutnya di input pada aplikasi e-renggar yang dimonitoring langsung oleh Kementrian. Pelaporan di aplikasi E-ranger dilakukan 3 tahap sesuai juknis BOK 2023 yaitu tahap pertama paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berkenaan, tahap kedua paling lambat tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan dan tahap ketiga paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya. Meskipun dalam pelaporannya mengalami kendala karena dalam pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu terkait spj yang belum selesai atau rampung.

### **3. Pencatatan/pembukuan**

Proses pembukuan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dimana pencatatan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dicatat di dalam Buku Kas Umum (BKU). Pembukuan dilakukan secara rutin oleh bendahara dengan pengawasan oleh kepala Puskesmas, serta didukung oleh bukti administrasi yang lengkap dan terstruktur.

#### 4. Informativeness (informatif)

Pemberian informasi kepada staf, terkait dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilakukan secara rutin melalui forum rapat dan lokmin. Namun kepada masyarakat informasi disampaikan secara terbatas hanya melalui forum lintas sektor, serata lebih difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan transparansi internal puskesmas sudah berjalan baik, tetapi transparansi eksternal perlu ditingkatkan.

#### 5. Openness (Keterbukaan)

keterbukaan (*openness*) dana BOK di puskesmas wanasaba telah dilaksanakan melalui perencanaan bersama, pencatatan keuangan yang jelas, penyampaian informasi anggaran, serta pelaporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK telah mengarah pada prinsip transparansi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

#### 6. Keberhasilan sasaran

keberhasilan sasaran dana BOK di Puskesmas Wanasaba dapat dikatakan cukup baik karena mampu mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat secara efektif. Dana BOK membantu meningkatkan cakupan pelayanan, memperluas jangkauan kegiatan lapangan, serta mendukung pencapaian target program kesehatan. Dengan pengelolaan yang tepat dan terarah, dana BOK di Puskesmas Wanasaba memberikan manfaat nyata bagi puskesmas dan masyarakat.

#### 7. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program

jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program BOK di Puskesmas Wanasaba ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan kebutuhan wilayah kerja puskesmas. Anggaran digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan promotif dan preventif dengan mempertimbangkan skala prioritas program kesehatan. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, alokasi dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

#### 8. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapaian tujuan pengelolaan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dapat dikatakan cukup baik, ini dilihat dari berhasilnya capaian serapan anggaran yang sudah direncanakan serta evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu program, mengetahui kekurangan, meningkatkan efektivitas, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan berikutnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu analisis akuntabilitas dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Wanasaba dilihat dari indikator akuntabilitas pengelolaan dana BOK yang terdiri dari pemanfaatan dana di tingkat puskesmas, pertanggungjawaban penggunaan dana, dan pencatatan/pembukuan dana BOK dapat dikatakan sudah baik dan akuntabel. Sebagaimana hasil pada temuan data dilapangan, indikator pemanfaatan dana di tingkat puskesmas sudah akuntabel dan baik, ini dilihat dari perencanaan dan pengelolaan dana BOK di puskesmas wanasaba sudah sesuai dengan JUKNIS BOK 2023. Selanjutnya indicator pertanggungjawaban penggunaan dana di puskesmas sudah bisa akuntabel, ini dilihat dari alur pelaporan yang dilakukan oleh pihak puskesmas wanasaba, dimana setelah menyelesaikan kegiatan puskesmas menginput realisasi penggunaan dan pada Kementerian Kesehatan dan dinas Kesehatan kabupaten/kota melalui aplikasi e-renggar, kendala yang sering dihadapi dalam pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu terkait spj yang belum selesai atau rampung. Selanjutnya indikator pencatatan/pembukuan sudah bisa dikatakan baik dan akuntabel. Ini

dilihat dari proses pencatatan/pembukuan dana BOK di puskesmas wanasaba yang dilakukan oleh bendahara BOK dilakukan secara rutin pada BKU.

Mengenai transparansi pengelolaan dana BOK di Puskesmas Wanasaba dilihat dari indikator *Informativeness* (informatif) dan *Openness* (Keterbukaan) sudah bisa dikatakan transparan. Sebagaimana hasil dari temuan data dilapangan, indikator *Informativeness* (informatif) dengan melihat keterbukaan pada pemberian informasi kepada staf, masyarakat/stakeholder yang membutuhkan sudah transparan, namun pemberian informasi yang dilakukan pihak puskesmas kepada masyarakat hanya melalui kegiatan lintas sektor. Kemudian indikator *Openness* (Keterbukaan) sudah bisa dikatakan transparan, ini dilihat dari perencanaan bersama, pencatatan keuangan yang jelas, penyampaian informasi anggaran, serta pelaporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

Selanjutnya efektivitas pengelolaan dana BOK dilihat dari indikator keberhasilan sarasara, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program, dan pencapaian tujuan menyeluruh sudah bisa dikatakan efektif. Sebagaimana hasil temuan data di lapangan, indikator keberhasilan sasaran dengan melihat pengaruh program BOK di wilayah kerja puskesmas sudah bisa dikatakan efektif karena mampu mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Selanjutnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program dengan melihat pembagian penggunaan anggaran untuk setiap program BOK di puskesmas sudah bisa dikatakan efektif, dimana jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program BOK di puskesmas ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan kebutuhan wilayah kerja puskesmas. Selanjutnya indikator pencapaian tujuan menyeluruh bisa dikatakan efektif, dimana ini dilihat dari berhasilnya capaian serapan anggaran yang sudah direncanakan serta evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program yang sudah direncanakan.

## REFERENSI

- Aeni, H., Effendy, L., & Nurabiah, &. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 67–81. <https://doi.org/10.32795/3cbd9n80>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, & M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan KEUANGAN DAERAH* (A. Musfirah, A. Puspita, & Hasriani (eds.)). Pusaka Almada.
- Kurnia, D., & & Hendrikus Triwibawanto Gedeona. (2016). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie Dan Padasuka Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), 111–138.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
- Mardasimo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Andi Yogyakarta.
- Mardiansih, L. (2021). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kinerja UPTD Puskesmas Teluk Pucung Bekasi Utara*.
- Megawati, S., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2023). *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Tingkat Kemandirian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Menilai Capaian Kinerja Program Di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan*. 2(1), 20–32.
- Ningsih, N. H. (2017). Pengaruh Pengetahuan Tentang Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Penatausahaan Apbd Berkonsep Value for Money Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Di Skpd Kota Palembang. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 171–191. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1170>

- Nur Fitriyah, Herlina Pusparini, & Nurabiah, N. (2021). Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 33–45. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.123>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2006).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2022).
- Pratiwi, N., Din, M., & Masdar, R. (2023). Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ). *9(01)*, 91–103.
- RATDO, D. A. (2020). Analisis efektivitas dan akuntabilitas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu.
- Risda, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan ( Bok ) Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Puskesmas. Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Salsabila, D. U. (2023). Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Studi Kasus Pada Puskesmas Poncol Kota Semarang). *UNIVERSITAS SEMARANG*.
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1945).
- Yolandia, R. A., & Hardiana, & H. (2019). Alternatif Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Cakupan K1-K\$. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia Satu*, 9, 113–122.